

Pengaruh Ketimpangan Sosial Ekonomi terhadap Kemiskinan di Daerah Tertinggal Indonesia: Analisis Data Panel 2015–2021

The Effect of Socio-Economic Inequality on Poverty in Disadvantaged Regions of Indonesia in 2015–2021

Haris Zirtana,¹ Muhammad Baiquni,² & Sudrajat³

¹harisz87@mail.ugm.ac.id (corresponding author)

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Indonesia

²mbaiquni@mail.ugm.ac.id

Gadjah Mada University

Bulaksumur, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, Indonesia

³sdrajat@mail.ugm.ac.id

Gadjah Mada University

Bulaksumur, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, Indonesia

Received: August 5, 2022 | Revised: June 6, 2024 | Published: June 30, 2025

Abstract: Poverty remains a major problem in disadvantaged regions of Indonesia. In 2021, all 24 of the poorest districts in the country were classified as disadvantaged. Furthermore, the level of social and economic inequality in these regions remains high, encompassing aspects of education, health, and employment. This study aims to analyze the effect of socio-economic inequality on poverty in Indonesia's disadvantaged regions using panel data from 62 regencies for the period 2015–2021. The social inequality variables include the Gini index of average years of schooling (education inequality), gender literacy gap (gender gap in education), life expectancy, morbidity rate, dependency ratio, and the percentage of poor informal workers. Economic inequality indicators include income inequality (Gini ratio) and gross regional domestic product (GRDP) per capita. The findings show that educational inequality and income inequality in disadvantaged regions are moderate. Health disparities are evident, as indicated by life expectancy levels below the national average, particularly among women. Panel regression analysis reveals that educational inequality, the percentage of poor informal workers, and GRDP per capita have a positive effect on poverty. Conversely, life expectancy, income inequality, and dependency ratios have a negative impact. This study highlights the importance of comprehensive efforts to address socio-economic disparities to reduce poverty. The recommended policy implications for the Indonesian House of Representatives and related stakeholders are special attention to addressing socio-economic disparities through relevant education curricula, strengthening preventive health, empowering



local economies, and adapting social protection programs, including synergy between institutions and empowering women.

Keywords: *disadvantaged regions; education inequality; health disparity; income inequality; panel data; poverty*

Abstrak: Kemiskinan masih menjadi permasalahan utama di daerah tertinggal di Indonesia. Pada tahun 2021, seluruh 24 kabupaten termiskin di Indonesia dikategorikan daerah tertinggal. Tingkat ketimpangan sosial dan ekonomi di wilayah ini masih cukup tinggi, mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketimpangan sosial dan ekonomi terhadap kemiskinan di daerah tertinggal, dengan menggunakan analisis data panel dari 62 kabupaten selama periode 2015–2021. Variabel ketimpangan sosial yang digunakan meliputi Gini rata-rata lama sekolah (ketimpangan pendidikan), gap gender melek huruf, angka harapan hidup, angka kesakitan, angka beban ketergantungan, serta persentase penduduk miskin pekerja informal. Sementara itu, ketimpangan ekonomi meliputi indikator rasio Gini pendapatan dan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan di daerah tertinggal berada pada kategori sedang, begitu pula dengan ketimpangan pendapatan. Selain itu, kesenjangan kesehatan masih terlihat dengan angka harapan hidup yang lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, terutama pada perempuan. Analisis regresi data panel menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan, persentase penduduk miskin pekerja informal, dan PDRB per kapita memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Sebaliknya, angka harapan hidup, ketimpangan pendapatan, dan angka beban ketergantungan memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan. Penelitian ini memberikan implikasi pentingnya upaya komprehensif untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi guna menurunkan tingkat kemiskinan. Implikasi kebijakan yang direkomendasikan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan *stakeholders* terkait adalah adanya perhatian khusus pada penanganan ketimpangan sosial ekonomi melalui kurikulum pendidikan relevan, penguatan kesehatan preventif, pemberdayaan ekonomi lokal, dan adaptasi program perlindungan sosial, termasuk sinergi antarlembaga dan pemberdayaan perempuan.

Kata kunci: daerah tertinggal; data panel; kemiskinan; kesenjangan kesehatan; ketimpangan pendapatan; ketimpangan pendidikan

Pendahuluan

Pengentasan kemiskinan menjadi agenda Pemerintah Indonesia sebagaimana termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024 pada agenda pembangunan ketiga yang berbunyi “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.” Agenda pembangunan ketiga ini secara rinci dijelaskan pada poin sasaran keenam, yaitu pengentasan kemiskinan (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [Bappenas], 2020, p. 4). Agenda tersebut dikuatkan dengan program Nawa Cita ke-3, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan dan Nawa Cita ke-5, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia (Bappenas, 2014, p. 5).

Kemiskinan dan ketimpangan merupakan dua aspek yang saling berkaitan erat. Spicker (2002, p. 38) menjelaskan, ketimpangan bukan hanya sekadar perbedaan antarindividu, tetapi mencerminkan distribusi kesempatan dan hasil ekonomi yang tidak

merata. Pengaruh ketimpangan dalam mengurangi kemiskinan merupakan masalah yang kompleks. Dalam hal ini, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan atau meredam tren kenaikan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia tidak bisa diterjemahkan ke dalam pengendalian (*control/targeting*) dari ketimpangan dalam ekonomi/*outcome* (seperti konsumsi/pendapatan). Akan tetapi, pengurangan kemiskinan juga fokus pada mengurangi ketimpangan sosial dalam hal *opportunity*, karena ketimpangan sosial akan cenderung mengabaikan *effort, hard work*, dan *talent* dari individu. Oleh karena itu, pemerintah juga perlu fokus pada peningkatan *equality of opportunity* dan redistribusi pendapatan yang merata.

Wilayah yang merupakan kantong-kantong kemiskinan dibedakan ke dalam dua golongan, yaitu daerah tertinggal dan daerah terbelakang (Soetomo, 2006, p. 277). Daerah tertinggal adalah wilayah yang telah lama dikembangkan bersamaan dengan daerah lain, tetapi karena keterbatasan sumber daya, infrastruktur, atau faktor struktural lainnya, daerah tersebut masih mengalami stagnasi dalam pertumbuhan sosial ekonomi. Sementara itu, daerah terbelakang merupakan wilayah yang sebenarnya memiliki potensi sumber daya yang cukup, tetapi belum dikelola secara optimal sehingga perkembangan sosial ekonominya masih rendah dan angka kemiskinan tetap tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2021, seluruh 24 kabupaten termiskin di Indonesia termasuk dalam kategori daerah tertinggal (Badan Pusat Statistik [BPS], 2021a). Tingkat ketimpangan di wilayah ini masih cukup tinggi, baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, maupun ketenagakerjaan. Misalnya, indeks pembangunan manusia (IPM) rata-rata di daerah tertinggal pada tahun 2021 hanya mencapai 60, jauh di bawah rata-rata nasional yang sebesar 72,29. Selain itu, rasio Gini di daerah tertinggal juga menunjukkan ketimpangan pendapatan yang signifikan, dengan angka di beberapa kabupaten melebihi 0,4 yang menunjukkan ketimpangan sedang hingga tinggi (BPS, 2021a). Ketimpangan sosial ekonomi yang terus berlangsung berkontribusi terhadap tingginya angka kemiskinan di daerah tertinggal, menghambat pertumbuhan ekonomi lokal, dan memperburuk kualitas hidup masyarakat.

Kabupaten daerah tertinggal perlu dianalisis tingkat kemiskinannya agar menjadi daerah yang berdaulat, berdaya saing, dan dapat mandiri setara dengan daerah maju lainnya. Rata-rata lama sekolah di daerah tertinggal masih jauh di bawah rata-rata nasional. Rasio Gini di beberapa kabupaten daerah tertinggal melebihi 0,4, menunjukkan ketimpangan pendapatan yang signifikan. Ketimpangan sosial, seperti akses terhadap kesehatan dan kesempatan kerja, serta ketimpangan ekonomi, seperti pendapatan dan PDRB per kapita, saling berkontribusi terhadap tingginya angka kemiskinan.

Masalah ini perlu menjadi perhatian DPR RI, khususnya alat kelengkapan yang menangani masalah sosial dalam kaitannya dengan ketimpangan pembangunan dan kemiskinan. Penelitian ini ingin menjawab pertanyaan bagaimana gambaran umum kondisi kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi di daerah tertinggal di Indonesia dan variabel apa saja yang memengaruhi determinan kemiskinan di daerah tertinggal di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi gambaran umum kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi di daerah tertinggal dan variabel-variabel yang memengaruhi determinan kemiskinan di daerah tertinggal di Indonesia. Penelitian menggunakan data sekunder dari BPS, berupa data tahunan dari 62 kabupaten di Indonesia yang termasuk ke dalam daerah tertinggal selama 2015–2021. Beberapa studi sebelumnya telah menganalisis hubungan antara ketimpangan dan kemiskinan, tetapi fokus dan temuannya berbeda-beda. Penelitian Dartanto dan Nurkholis (2013) dan Firdaus et al. (2021) menggunakan analisis data panel untuk mengidentifikasi determinan

kemiskinan di Indonesia, tetapi lebih menekankan pada faktor ekonomi makro seperti pertumbuhan PDRB dan inflasi, tanpa menyoroti dimensi ketimpangan sosial secara komprehensif. Sementara itu, Riyadi dan Ghuzini (2021) mengkaji ketimpangan pendidikan dan pendapatan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), tetapi terbatas pada dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, bukan kemiskinan. Di tingkat regional, Anggadini (2015) menemukan pengaruh signifikan PDRB per kapita terhadap kemiskinan di Sulawesi Tengah, tetapi hanya mencakup ketimpangan ekonomi. Studi lintas negara oleh Araujo *et al.* (2017) menunjukkan bahwa konsentrasi pendapatan memperburuk kemiskinan, tetapi tidak membahas ketimpangan akses kesehatan atau ketenagakerjaan. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini ingin mengetahui secara bersama-sama pengaruh ketimpangan sosial ekonomi terhadap kemiskinan. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada salah satu ketimpangan saja. Perbedaan lainnya terletak pada aspek cakupan wilayah, variabel, dan periode yang digunakan.

Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dan regresi data panel untuk menganalisis hubungan antara ketimpangan sosial dan ketimpangan ekonomi terhadap kemiskinan di daerah tertinggal pada 2015–2021. Pemilihan metode ini didasarkan pada kemampuannya untuk mengatasi heterogenitas antardaerah dan memanfaatkan data *time-series* dan *cross-section* secara bersamaan. Variabel yang digunakan meliputi ketimpangan pendidikan (Gini rata-rata lama sekolah), ketimpangan gender pendidikan (ketimpangan gender melek huruf), angka harapan hidup, angka kesakitan, angka beban ketergantungan, persentase penduduk miskin pekerja informal, rasio Gini pendapatan, dan PDRB per kapita. Pemilihan variabel mengadopsi penelitian Dartanto dan Nurkholis (2013), Randa dan Sentosa (2020), serta Firdaus *et al.* (2021). Untuk memastikan validitas model, dilakukan pengujian asumsi klasik, termasuk uji multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Model regresi panel yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$POV_{it} = \beta_0 + \beta_1 Edu_{it} + \beta_2 AHH_{it} + \beta_3 Gini_{it} + \beta_4 GenAMH_{it} + \beta_5 ABK_{it} + \beta_6 Morb_{it} + \beta_7 TKK_{it} + \beta_8 Ln(PDRB) + \varepsilon_{it}$$

Di mana:

POV = Persentase penduduk miskin

$\beta_{0,1,2,3,4,5,6,7,8}$ = Koefisien regresi

Edu = Gini rata-rata lama sekolah (ketimpangan pendidikan)

AHH = Angka harapan hidup (tahun)

Gini = Rasio Gini (ketimpangan pendapatan)

GenAMH = Ketimpangan gender angka melek huruf (%)

ABK = Angka beban ketergantungan (%)

Morb = Angka kesakitan (%)

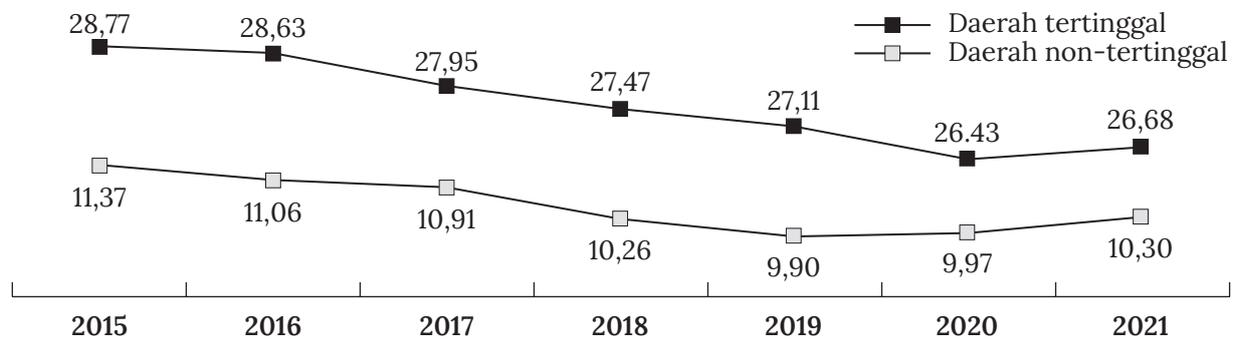
TKK = Persentase penduduk miskin yang bekerja sektor informal (%)

PDRB = PDRB per kapita (ribu rupiah)

Daerah Tertinggal

Pada RPJMN tahun 2015–2019 ditetapkan jumlah daerah tertinggal di Indonesia sebanyak 122 kabupaten. Melalui berbagai program yang telah dilaksanakan, baik oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian Desa PDTT) maupun kementerian lainnya, serta dukungan dana desa, hingga akhir tahun 2019 telah dapat dientaskan sebanyak 62 kabupaten daerah tertinggal, dan tersisa 60 kabupaten daerah tertinggal. Namun, hal tersebut belum mencapai target,

karena sasarannya adalah 80 kabupaten yang terentaskan. Sementara itu, terdapat dua kabupaten daerah otonom baru yang termasuk indikasi daerah tertinggal di tahun 2020 sehingga Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden RI Nomor 63 telah menetapkan sebanyak 62 kabupaten daerah tertinggal yang harus dientaskan.



Catatan: Dihitung dengan rata-rata dari keseluruhan persentase penduduk miskin di kabupaten tertinggal dan non-tertinggal sesuai Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020.

Gambar 1. Rata-rata Penduduk Miskin Daerah Tertinggal dan Non-Tertinggal (Persen), 2015-2021

Sumber: BPS (2022c).

Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di daerah tertinggal jauh lebih besar dibanding penduduk miskin di daerah non-tertinggal. Pada tahun 2015, rata-rata persentase penduduk miskin di daerah tertinggal sebesar 28,77 persen, sementara di daerah non-tertinggal hanya 11,37 persen. Selama lima tahun berikutnya, angka ini menurun secara bertahap, dan pada tahun 2020 persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di daerah tertinggal turun menjadi 26,43 persen. Namun, angka ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan daerah non-tertinggal yang hanya 9,97 persen. Pada tahun 2021 tingkat kemiskinan kembali meningkat sebagai dampak pandemi Covid-19, di mana rata-rata penduduk miskin di daerah tertinggal mencapai 10,30 persen.

Salah satu komponen utama dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) adalah pengentasan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, dan pengurangan kesenjangan (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018, p. 58). *Goal ke-10* adalah mengurangi kesenjangan yang merupakan *goal* baru, sangat penting untuk diselesaikan karena akan mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan partisipatif. Sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan, peningkatan produktivitas dan akses yang merata bagi setiap orang diperlukan agar tidak menciptakan kesenjangan yang makin melebar.

Menurut Todaro dan Smith (2015, p. 251), kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan inti dari semua masalah pembangunan di negara berkembang. Penting untuk menggabungkan ketimpangan sosial dan ekonomi dalam satu kajian, karena keduanya saling terkait dan memperkuat. Ketimpangan ekonomi, seperti perbedaan pendapatan yang besar, dapat menyebabkan ketimpangan sosial, seperti perbedaan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Sebaliknya, ketimpangan sosial juga dapat memperburuk ketimpangan ekonomi, karena individu yang kurang berpendidikan dan kurang sehat cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah. Masalah ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia menjadi tantangan serius dalam upaya mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, termasuk daerah tertinggal.

Tabel 1. Daftar Kabupaten Daerah Tertinggal, 2020–2024

No	Provinsi	Kabupaten	No	Provinsi	Kabupaten
1.	Sumatra Utara	Nias	32.	Maluku Utara	Pulau Taliabu
2.	Sumatra Utara	Nias Selatan	33.	Papua Barat	Teluk Wondama
3.	Sumatra Utara	Nias Utara	34.	Papua Barat	Teluk Bintuni
4.	Sumatra Utara	Nias Barat	35.	Papua Barat	Sorong Selatan
5.	Sumatra Barat	Kepulauan Mentawai	36.	Papua Barat	Sorong
6.	Sumatra Selatan	Musi Rawas Utara	37.	Papua Barat	Tambrauw
7.	Lampung	Pesisir Barat	38.	Papua Barat	Maybrat
8.	Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara	39.	Papua Barat	Manokwari Selatan
9.	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat	40.	Papua Barat	Pegunungan Arfak
10.	Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	41.	Papua	Jayawijaya
11.	Nusa Tenggara Timur	Kupang	42.	Papua	Nabire
12.	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Selatan	43.	Papua	Paniai
13.	Nusa Tenggara Timur	Belu	44.	Papua	Puncak Jaya
14.	Nusa Tenggara Timur	Alor	45.	Papua	Boven Digoel
15.	Nusa Tenggara Timur	Lembata	46.	Papua	Mappi
16.	Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	47.	Papua	Asmat
17.	Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah	48.	Papua	Yahukimo
18.	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya	49.	Papua	Pegunungan Bintang
19.	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Timur	50.	Papua	Tolikara
20.	Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	51.	Papua	Keerom
21.	Nusa Tenggara Timur	Malaka	52.	Papua	Waropen
22.	Sulawesi Tengah	Donggala	53.	Papua	Supiori
23.	Sulawesi Tengah	Tojo Una-Una	54.	Papua	Mamberamo Raya
24.	Sulawesi Tengah	Sigi	55.	Papua	Nduga
25.	Maluku	Maluku Tenggara Barat	56.	Papua	Lanny Jaya
26.	Maluku	Kepulauan Aru	57.	Papua	Mamberamo Tengah
27.	Maluku	Seram Bagian Barat	58.	Papua	Yalimo
28.	Maluku	Seram Bagian Timur	59.	Papua	Puncak
29.	Maluku	Maluku Barat Daya	60.	Papua	Dogiyai
30.	Maluku	Buru Selatan	61.	Papua	Intan Jaya
31.	Maluku Utara	Kepulauan Sula	62.	Papua	Deiyai

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020.

Konsep Determinan Kemiskinan

Menurut Rambe (2018, p. 237), keberhasilan pembangunan direpresentasikan dengan tercapainya pemerataan kesejahteraan. Pemerataan diartikan bahwa kesenjangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan materiil (aspek ekonomi) dan nonmateriil (aspek sosial) dari unsur-unsur nilai kepuasan dan jaminan hidup sejahtera tidak terus melebar, melainkan terus mengecil antarkelas sosial dan antarwilayah.

Chambers (1995, p. 188) mengajukan delapan keadaan yang mengikuti kondisi kurang menguntungkan dan saling terkait, yaitu: (1) kemiskinan itu sendiri (*poverty*); (2) kekurangan kondisi sosial (*social inferiority*); (3) keterasingan (*isolation*); (4) kelemahan dalam hal fisik (*physical weakness*); (5) rentan terhadap suatu guncangan (*vulnerability*); (6) kurang sejahtera karena musim (*seasonality*); (7) ketidakberdayaan (*powerlessness*); dan (8) penghinaan karena ketergantungan atau meminta-minta pada orang lain (*humiliation*).

Maipita (2014, p. 85) menjelaskan bahwa perangkat kemiskinan sering menjadi masalah di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Gangguan kecil pada kondisi perekonomian atau perubahan musim dapat membuat seseorang yang awalnya hidup kurang sejahtera menjadi makin miskin. Keterasingan atau isolasi, baik secara fisik maupun psikis, juga memperparah kondisi kemiskinan. Masyarakat miskin yang tinggal di daerah terpencil, seperti di desa, daerah tertinggal, atau lokasi yang sulit dijangkau, sering mengalami hambatan dalam mengakses layanan dasar. Masyarakat miskin

biasanya terisolasi dari berbagai informasi dan akses, seperti akses terhadap perbankan, fasilitas kesehatan yang memadai, pendidikan yang berkualitas, kemajuan teknologi, dan banyak hal lain yang berhubungan dengan fasilitas kesejahteraan.

Konsep Ukuran Ketimpangan

Indikator yang paling lazim digunakan untuk mengukur besarnya ketimpangan dalam distribusi pendapatan adalah metode koefisien Gini pendapatan (rasio Gini). Menurut BPS (2021b, p. 71), koefisien rasio Gini digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan secara keseluruhan. Koefisien Gini juga paling banyak digunakan selain tiga ukuran lainnya (ukuran Bank Dunia, indeks Theil, dan indeks-L). Rasio Gini sejalan dengan empat prinsip pengukuran sehingga dapat digunakan untuk membandingkan ketimpangan distribusi pendapatan antarwaktu maupun antarwilayah (Todaro & Smith, 2015, p. 222).

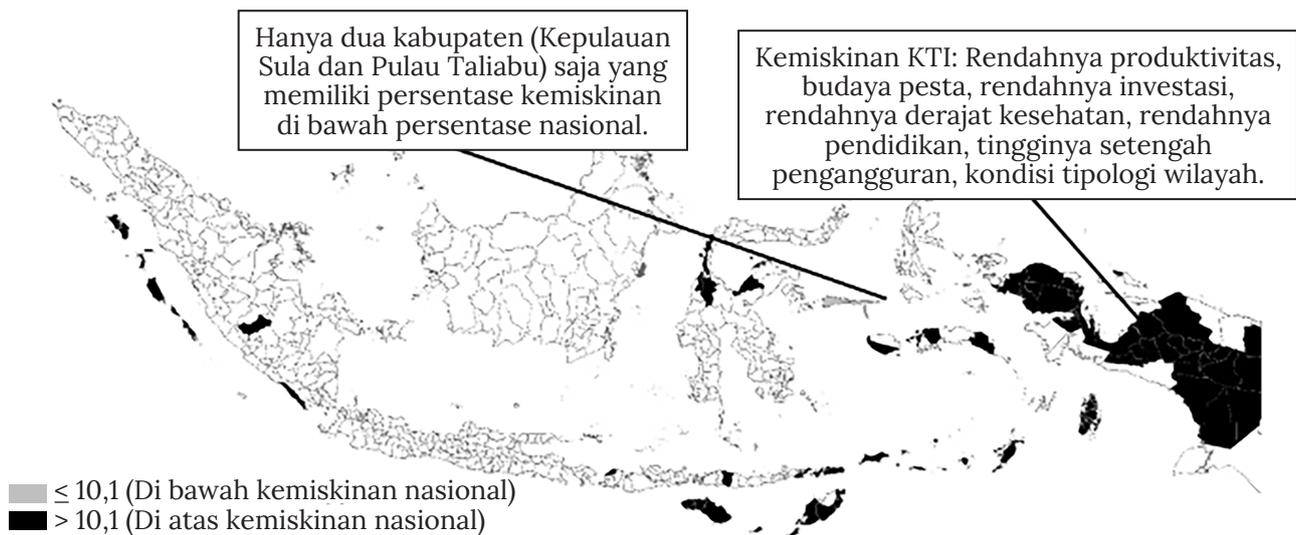
Metode persamaan koefisien Gini yang dipakai dalam pengukuran ketimpangan pendidikan adalah model persamaan koefisien Gini pendidikan berdasarkan Thomas *et al.* (2001, p. 6). Metode ini menghitung indeks Gini (nilai ketimpangan) dari rata-rata lama sekolah yang telah dicapai oleh seluruh penduduk. Menurut Todaro dan Smith (2015, p. 222), nilai koefisien Gini berkisar 0–1, makin mendekati 0 menunjukkan tingkat distribusi yang makin merata. Sebaliknya, jika nilai rasio Gini makin mendekati 1 menunjukkan distribusi yang makin tidak merata (timpang). Riyadi dan Ghuzini (2021, p. 142) membagi ketimpangan pendapatan/pendidikan dalam lima kriteria: (1) sangat rendah jika koefisien Gini $\leq 0,20$; (2) rendah jika $0,20 < \text{koefisien Gini} \leq 0,35$; (3) sedang jika $0,35 < \text{koefisien Gini} \leq 0,50$; (4) tinggi jika $0,50 < \text{koefisien Gini} \leq 0,70$; dan (5) sangat tinggi jika koefisien Gini $> 0,70$.

Dinamika Kemiskinan dan Ketimpangan Daerah Tertinggal

Secara umum, kondisi kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren membaik, ditandai dengan penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin. Namun, pandemi Covid-19 berdampak negatif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Pada Maret 2021, jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebanyak 27,54 juta orang atau 10,14 persen dari total penduduk. Dibandingkan Maret 2020, jumlah tersebut meningkat sekitar 1,12 juta orang. Dengan persentase penduduk miskin nasional sebesar 10,14 persen, tercatat 267 kabupaten/kota (51,94 persen) memiliki tingkat kemiskinan yang melebihi angka nasional tersebut. Sementara itu, dari 62 kabupaten yang masuk kategori daerah tertinggal, hanya dua kabupaten yang memiliki persentase kemiskinan di bawah persentase kemiskinan nasional.

Dari Gambar 2 terlihat bahwa Kabupaten Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu memiliki persentase penduduk miskin di bawah kemiskinan nasional dengan masing-masing persentase 8,23 persen dan 7,49 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan dominan di daerah tertinggal. Jika dilihat peringkat kabupaten dengan kemiskinan tertinggi pada tahun 2021, maka 24 kabupaten termiskin merupakan kabupaten daerah tertinggal.

Menurut Bappenas (2018, p. 3), wilayah dengan kemiskinan tinggi dapat dicirikan sebagai berikut, yaitu mengalami tingkat kemiskinan lebih dari 15 persen selama tiga tahun berturut-turut, mengalami perlambatan laju penurunan kemiskinan, dan memiliki permasalahan kemiskinan multidimensi. Berdasarkan indikator tersebut, daerah tertinggal sangat rentan termasuk dalam kategori wilayah dengan kemiskinan tinggi, karena sebagian besar wilayah ini tidak hanya memiliki angka kemiskinan absolut yang

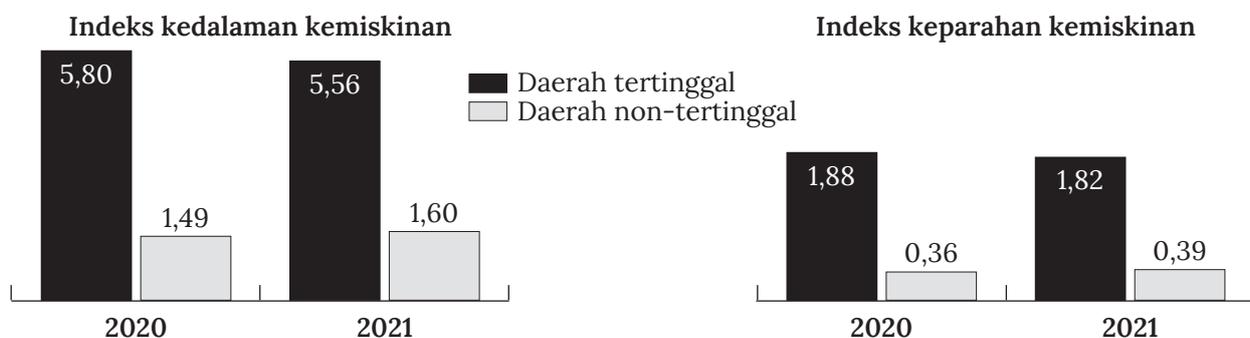


Gambar 2. Sebaran Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Daerah Tertinggal Indonesia, 2021
 Sumber: BPS (2021a).

tinggi, tetapi juga menghadapi kesenjangan sosial ekonomi yang kompleks dan struktural. Hal ini tercermin dalam data BPS tahun 2021, di mana lima kabupaten di daerah tertinggal tercatat sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi, yaitu Kabupaten Intan Jaya (41,66 persen), Deiyai (43,65 persen), Lanny Jaya (39,53 persen), Supiori (38,79 persen), dan Yahukimo (38,82 persen) (BPS, 2021a). Kelima kabupaten ini tidak hanya memiliki angka kemiskinan di atas 15 persen, tetapi juga menunjukkan karakteristik stagnasi dalam pengurangan kemiskinan dan menghadapi persoalan kemiskinan multidimensi, sebagaimana yang didefinisikan oleh Bappenas.

Indeks kedalaman kemiskinan (P_1) di daerah tertinggal pada tahun 2021 rata-rata sekitar 5,56 persen. Angka ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang cukup besar antara rata-rata pengeluaran konsumsi penduduk miskin dan garis kemiskinan di daerah tertinggal, yaitu sekitar 5,56 persen. Berbeda dengan persentase penduduk miskin (P_0) yang menganggap semua orang miskin sama miskinnya. Indeks kedalaman kemiskinan (P_1) adalah ukuran intensitas atau kedalaman kemiskinan dengan melihat sejauh mana pendapatan orang miskin terhadap garis kemiskinan (Irawan *et al.*, 2016, p. 141).

Makin tinggi P_1 makin dalam jurang kemiskinan sehingga makin sulit untuk mengentaskan penduduk miskin dari perangkap kemiskinan. Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan (P_2) di daerah tertinggal pada tahun 2021 rata-rata sekitar 1,82 persen,



Gambar 3. Indeks Kedalaman (P_1) dan Keparahannya (P_2) Kemiskinan Daerah Tertinggal Indonesia, 2021
 Sumber: BPS (2021a).

yang mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran konsumsi antarpenduduk miskin masih ada kesenjangan.

Pengaruh Ketimpangan Sosial dan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Daerah Tertinggal

Ketimpangan dan kemiskinan merupakan dua masalah yang saling berkaitan, meskipun keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Menurut McKay (2002), ketimpangan sering kali menjadi faktor penting. Bahkan ketimpangan menjadi penentu dalam meningkatkan angka kemiskinan. Pada tingkat tertentu, ketimpangan dalam pendapatan, pendidikan, dan kepemilikan aset dapat mengindikasikan kekurangan dalam pemenuhan kehidupan layak. Ketimpangan sosial dan ekonomi masih menjadi tantangan besar, terutama di daerah tertinggal. Menurut Setianingtias *et al.* (2019), disparitas ketimpangan di Indonesia, baik dari dimensi ekonomi maupun sosial, masih perlu diselesaikan oleh pemerintah. Augusta (2014, p. 18) juga menegaskan, ketimpangan pendapatan, pendidikan, dan kesehatan merupakan isu strategis yang menjadi sumber masalah, termasuk di daerah terpencil dan perbatasan. Pada Tabel 2 dapat diketahui bahwa ketimpangan pendidikan maupun ketimpangan kesehatan, masih cukup tinggi di daerah tertinggal.

Tabel 2. Perkembangan Ketimpangan Pendidikan, Angka Harapan Hidup, Ketimpangan Pendapatan, dan Rata-rata PDRB per Kapita di Daerah Tertinggal dan Daerah Non-Tertinggal, 2017–2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Ketimpangan Pendidikan					
Daerah tertinggal	0,3885	0,4063	0,3966	0,3880	0,3790
Daerah non-tertinggal	0,2801	0,2843	0,2778	0,2768	0,2731
Rata-rata angka harapan hidup					
Daerah tertinggal	63,98	64,24	64,59	64,76	64,89
Daerah non-tertinggal	69,61	69,81	70,06	70,21	70,31
Ketimpangan pendapatan					
Daerah tertinggal	0,3711	0,3646	0,3700	0,3690	0,3698
Daerah non-tertinggal	0,3921	0,3886	0,3809	0,3805	0,3835
Rata-rata PDRB per kapita per tahun (Juta Rupiah)					
Daerah tertinggal	31,5197	33,8318	35,8614	30,8771	31,5387
Daerah non-tertinggal	52,2458	56,1543	59,3587	57,3021	61,921

Sumber: BPS (2022c).

Berdasarkan analisis regresi data panel dengan metode *cross-section SUR panel corrected standard error (PCSE)* pada estimator *fixed effects cross-section weights*, ditemukan bahwa seluruh variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Berdasarkan model ini, 99,73 persen variasi dari persentase penduduk miskin dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel bebasnya, sedangkan sekitar 0,27 persen sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model persamaan. Berdasarkan hasil estimasi model, ditemukan bahwa variabel ketimpangan pendidikan, angka harapan hidup, persentase penduduk miskin pekerja informal, dan PDRB per kapita memengaruhi persentase penduduk miskin pada tingkat signifikansi satu persen. Sementara itu, variabel ketimpangan pendapatan signifikan memengaruhi persentase penduduk miskin pada

taraf signifikansi lima persen, dan variabel angka beban ketergantungan berpengaruh signifikan terhadap persentase kemiskinan pada taraf signifikansi 10 persen. Variabel ketimpangan gender melek huruf dan morbiditas tidak signifikan memengaruhi persentase penduduk miskin.

Tabel 3. Hasil Model Regresi Data Panel dengan Variabel Dependen Persentase Penduduk Miskin

Variabel independen	Koefisien	Standard Error
Ketimpangan pendidikan	3,4446	0,8921***
Angka harapan hidup	-1,2548	0,1139***
Ketimpangan pendapatan	-1,7205	0,8029**
Ketimpangan gender melek huruf	0,2090	0,6241
Morbiditas	-0,0054	0,0050
Persentase penduduk miskin pekerja informal	0,0218	0,0036***
Angka beban ketergantungan	-0,0131	0,0079*
Logaritma natural PDRB per kapita	0,9890	0,3724***
Konstanta	97,1481	8,2091***
F-statistic	1939,083	
Prob (F-statistic)	0,0000	
R-squared	0,9973	

Catatan: *** signifikan pada 0,01; ** signifikan pada 0,05; * signifikan pada 0,1
 Sumber: Data penelitian, diolah (2022).

Ketimpangan pendidikan di daerah tertinggal lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah tidak tertinggal, yang diindikasikan dengan masih terjadinya ketimpangan hasil pembangunan dalam pencapaian pendidikan. Ketimpangan pendidikan di daerah non-tertinggal sudah mencapai kategori ketimpangan rendah, sedangkan di daerah tertinggal masih berada pada kategori ketimpangan sedang. Begitu juga untuk derajat kesehatan, di daerah tertinggal masih rendah jika dibandingkan dengan di daerah non-tertinggal. Demikian juga angka harapan hidup di daerah tertinggal lebih rendah dibandingkan di daerah non-tertinggal. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan penduduk di daerah tertinggal untuk hidup lebih lama dan hidup sehat masih belum setara dengan penduduk di daerah non-tertinggal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persentase penduduk miskin. Artinya, apabila ketimpangan pendidikan meningkat 0,01 satuan, dengan asumsi variabel lainnya tetap (*ceteris paribus*), maka persentase penduduk miskin akan naik sebesar 3,445 persen. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan merupakan faktor kunci yang memperparah kemiskinan di daerah tertinggal. Ketimpangan pendidikan menciptakan siklus kemiskinan antargenerasi. Anak-anak dari keluarga miskin cenderung tidak dapat mengakses pendidikan berkualitas sehingga mereka sulit keluar dari kemiskinan.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian dari Dzidza *et al.* (2018) yang menyatakan bahwa upaya dan kebijakan dalam menurunkan ketimpangan pendidikan akan memberikan hasil positif dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Hal ini dikarenakan peningkatan akses terhadap pendidikan akan mendorong kenaikan angka partisipasi di semua jenjang sekolah, terutama pada tingkat dasar dan menengah, serta mendorong penyediaan infrastruktur pendidikan dan peningkatan kompetensi pengajar yang pada akhirnya dapat menekan angka kemiskinan. Adiningtyas dan Budyanra (2020) menunjukkan bahwa ada ketimpangan pendidikan yang tinggi di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan sebaliknya. Ketimpangan pendidikan di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor yaitu fasilitas pendidikan yang belum merata di

setiap daerah, dikarenakan Indonesia merupakan daerah kepulauan yang sulit dijangkau. Selain itu, kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan di daerah juga memengaruhi tinggi rendahnya ketimpangan pendidikan.

Variabel angka harapan hidup menunjukkan adanya pengaruh negatif dan signifikan terhadap persentase penduduk miskin. Peningkatan angka harapan hidup sebesar 0,01 satuan, di mana variabel lainnya tetap (*ceteris paribus*), akan menyebabkan persentase penduduk miskin menurun sebesar 1,25 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dapat mengurangi kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Anggadini (2015), Asrol dan Ahmad (2018), Ginting (2020), Lawanson dan Umar (2021), dan Sudaryati *et al.* (2021) menyatakan bahwa makin tinggi angka harapan hidup maka tingkat kesehatan masyarakat makin berkualitas dan kemiskinan makin turun.

Kondisi ini sesuai dengan teori lingkaran kemiskinan, dengan meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat (bertambahnya angka harapan hidup), maka tingkat produktivitas masyarakat juga meningkat sehingga laju pertumbuhan ekonomi bergerak naik yang pada akhirnya akan mengurangi kemiskinan. Berdasarkan Lawanson dan Umar (2021), tingkat kesehatan dapat berdampak pada tingkat kemiskinan. Peningkatan kesehatan dapat menyebabkan meningkatnya umur harapan hidup, memungkinkan orang untuk bekerja lebih lama, meningkatkan penghasilan mereka, dan membantu dalam pembelajaran yang tepat dan pemikiran rasional, yang pada akhirnya membantu membebaskan orang dari kemiskinan.

Kondisi ketimpangan pendapatan di daerah tertinggal lebih rendah dibandingkan di daerah tidak tertinggal dan masuk kategori ketimpangan sedang. Namun, ketimpangan pendapatan masih fluktuatif dan cenderung mengalami perlambatan dalam penurunan ketimpangan. Ketimpangan pendapatan ini masih menjadi masalah yang sulit diatasi, termasuk di daerah tertinggal. Variabel ketimpangan pendapatan menunjukkan adanya pengaruh negatif dan signifikan terhadap persentase penduduk miskin. Artinya, apabila ketimpangan pendapatan meningkat sebesar 0,01 satuan, sementara variabel lainnya tetap (*ceteris paribus*), maka persentase penduduk miskin menurun sebesar 1,72 persen. Arah hubungan negatif ini tidak sesuai dengan apa yang telah diekspektasikan secara teori.

Meskipun bertentangan dengan ekspektasi awal, hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Febriaty (2017), Hatta dan Azis (2017), Kumaat *et al.* (2019), dan Tungka *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan memiliki hubungan yang negatif terhadap tingkat kemiskinan. Araujo *et al.* (2017) menyimpulkan, akan salah jika memberikan rekomendasi kebijakan yang sama ke semua daerah karena sensitivitas tingkat kemiskinan bergantung pada tingkat awal pembangunan dan tingkat ketimpangan. Di daerah dengan tingkat pembangunannya masih rendah atau ketimpangan pendapatannya sudah tinggi sejak awal, atau bahkan keduanya, pengurangan kemiskinan dapat diupayakan dengan cara meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan justru dapat berkontribusi pada penurunan kemiskinan.

Rata-rata PDRB per kapita per tahun menunjukkan, daerah tertinggal masih lebih rendah dibandingkan dengan daerah tidak tertinggal. Bahkan, perbedaannya hampir dua kali lipat. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada perbedaan kesejahteraan yang tinggi antara kedua daerah tersebut. Variabel PDRB per kapita mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap persentase kemiskinan. Artinya, apabila PDRB per kapita penduduk daerah tertinggal meningkat 0,01 satuan (ribu rupiah), di mana variabel lainnya tetap (*ceteris paribus*), akan menyebabkan persentase penduduk miskin

meningkat sebesar 0,98 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif dapat memperparah ketimpangan dan kemiskinan. Peningkatan PDRB per kapita sering kali hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, sedangkan kelompok miskin tidak merasakan manfaatnya.

Di daerah tertinggal, struktur ekonomi yang didominasi sektor informal dan subsisten menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak berdampak signifikan pada pengurangan kemiskinan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wibowo (2012) yang menyebutkan bahwa pendapatan per kapita yang tinggi tidak menjamin kemiskinan absolut menurun. Hal ini dikarenakan tingkat pendapatan yang diterima oleh kelompok-kelompok penduduk yang paling miskin tidak sama di setiap daerah. Mungkin saja suatu wilayah dengan pendapatan per kapita yang tinggi justru mempunyai persentase penduduk di bawah garis kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan suatu daerah dengan pendapatan per kapita yang lebih rendah. Faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan tersebut adalah struktur perekonomian yang berlangsung di wilayah tersebut, serta pengaturan politik dan kelembagaan yang dalam praktiknya ikut menentukan pola distribusi pendapatan.

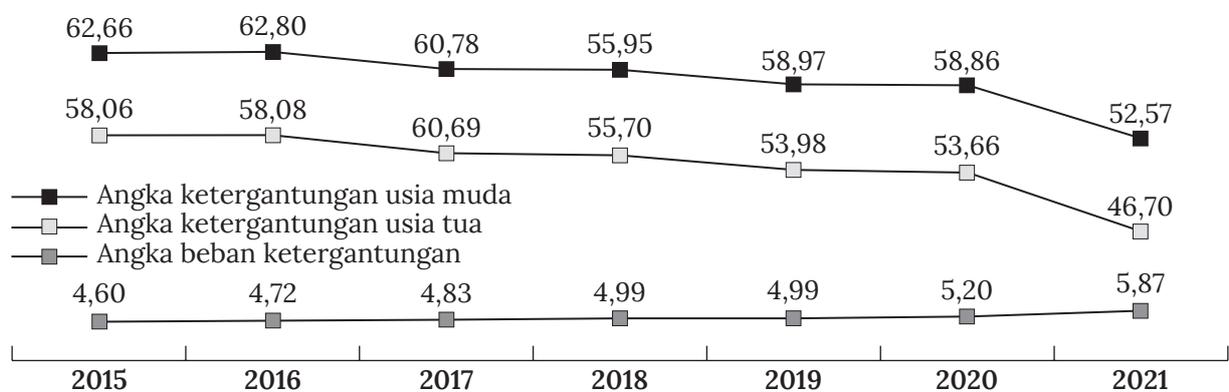
Hasil penelitian Marmujiono (2014) juga menunjukkan bahwa PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Peningkatan pendapatan per kapita yang ada belum merata untuk seluruh lapisan masyarakat dan hanya dirasakan oleh sekelompok masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menekan ketimpangan pendapatan melalui program-program yang tepat sasaran, seperti melalui peningkatan sektor sekunder serta meningkatkan produktivitas pertanian dengan memberi pelatihan pengolahan hasil pertanian agar hasil produksi memiliki nilai jual yang lebih tinggi.

Variabel penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor informal menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan terhadap persentase penduduk miskin. Jika penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor informal meningkat 0,01 satuan, di mana variabel lainnya tetap (*ceteris paribus*), akan menyebabkan persentase penduduk miskin meningkat sebesar 0,02 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sektor informal menyediakan lapangan kerja, keberadaannya tidak mampu untuk mengentaskan kemiskinan. Banyak pekerja sektor informal menganggap pekerjaan sektor informal sebagai pilihan sementara hingga mereka mendapatkan kesempatan untuk bekerja di sektor formal. Menurut Suwandi (2013) dalam Amsal (2018, p. 15), memasuki sektor informal sangatlah mudah dan tidak ada syarat yang ketat, di mana siapa pun yang memiliki kemauan bisa terjun ke sektor tersebut. Sektor informal muncul karena timbulnya masalah kemiskinan akibat tidak cukup tersedianya lapangan pekerjaan, terutama di wilayah dengan status perkotaan.

Berdasarkan Schneider dan Williams (2013), penduduk miskin cenderung terlibat dalam pekerjaan informal, tetapi mereka mendapat sedikit manfaat dari sektor tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa ekonomi informal memperkuat (bukan mengurangi) kesenjangan yang dihasilkan oleh ekonomi formal. Pekerjaan sektor informal sering muncul akibat sistem hukum yang tidak memadai untuk memformalkan pendaftaran suatu usaha ekonomi. Masalah yang dapat ditimbulkan oleh informalitas sangat besar, seperti dapat menjadi kendala serius bagi pertumbuhan bisnis, dan kurangnya penegakan kontrak bisnis dan pekerjaan. Kondisi ini membuat kemakmuran jauh lebih sulit untuk dicapai. Adanya pekerja sektor informal akan meningkatkan marginalitas antara kelompok miskin dan kaya (William, 2014). Penduduk miskin secara tidak proporsional terlibat dalam pekerjaan informal. Partisipasi mereka di sektor informal juga akan membuat posisi mereka tetap berada dalam kemiskinan. Hal ini dikarena-

kan mereka memperoleh tingkat upah yang lebih rendah dari total pendapatan (PDRB) tahunan sektor informal.

Variabel angka beban ketergantungan penduduk menunjukkan adanya pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap persentase penduduk miskin pada taraf signifikansi 10 persen. Artinya, apabila angka beban ketergantungan penduduk menurun sebesar 0,01 persen, di mana variabel lainnya tetap (*ceteris paribus*), akan menyebabkan persentase penduduk miskin meningkat sebesar 0,0144 persen. Dari Gambar 4 terlihat, daerah tertinggal memiliki angka beban ketergantungan yang cenderung menurun dari tahun ke tahun. Jika dirinci lagi, terlihat bahwa angka ketergantungan usia muda (0–14 tahun) cenderung menurun, sedangkan angka beban ketergantungan usia tua (65 tahun ke atas) cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa daerah tertinggal telah mengalami penurunan fertilitas dan terjadi peningkatan penduduk usia tua.



Gambar 4. Rata-Rata Angka Beban Ketergantungan Daerah Tertinggal

Sumber: BPS (2022c).

Menurut Bappenas (2018, p. 36), kondisi kependudukan di kawasan timur Indonesia (KTI) memiliki tingkat pertumbuhan penduduk tinggi yang berdampak terhadap besarnya jumlah anggota rumah tangga, struktur umur penduduk, dan angka beban ketergantungan. Kemiskinan yang tinggi di wilayah tersebut juga karena adanya peningkatan penduduk usia kerja (penurunan angka beban ketergantungan) tidak diimbangi dengan tingkat produktivitas. Rendahnya produktivitas dikarenakan sebagian besar penduduk yang masih bekerja sebagai petani atau nelayan yang bersifat subsisten hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, juga kekurangan investasi menyebabkan lapangan kerja terbatas untuk menyerap tenaga kerja.

Sebagian besar penelitian yang ada hanya berfokus pada salah satu ketimpangan saja dan masih jarang yang mengkaji daerah tertinggal. Hasil penelitian ini menunjukkan, masih terdapat kesenjangan yang nyata dalam pencapaian pembangunan di daerah tertinggal. Mayoritas kabupaten daerah tertinggal memiliki ketimpangan pendidikan, kesenjangan kesehatan, dan ketimpangan ekonomi dengan pencapaian nilai yang masih berada di bawah nilai nasional. Ketimpangan sosial ekonomi ini dapat menambah polarisasi baik di tingkat nasional dan daerah. Tren yang tidak menguntungkan ini berpotensi menyebabkan peningkatan risiko keresahan sosial dan disintegrasi kawasan (yaitu ketidakpuasan politik), yang akan berdampak negatif pada pertumbuhan di masa depan.

Penutup

Kemiskinan di daerah tertinggal memiliki keterkaitan erat dengan ketimpangan sosial dan ekonomi. Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia juga merupakan daerah yang mengalami ketimpangan yang signifikan, baik dalam hal pendidikan, pendapatan, maupun akses terhadap layanan dasar. Baik nilai P_1 dan P_2 memiliki nilai yang relatif cukup tinggi di daerah tertinggal yang menunjukkan, intensitas dan keparahan kemiskinan lebih nyata terjadi di daerah tertinggal. Nilai P_1 dan P_2 yang relatif tinggi di daerah tertinggal menunjukkan bahwa bukan hanya jumlah penduduk miskin yang besar, tetapi juga kedalaman dan keparahan kemiskinan yang lebih nyata dibandingkan daerah lain. Dengan demikian, tingginya konsentrasi penduduk miskin di daerah tertinggal selalu disertai dengan intensitas jurang ketimpangan kesejahteraan yang lebih lebar.

Secara empiris, variabel ketimpangan pendidikan, persentase penduduk miskin pekerja informal, dan PDRB per kapita berpengaruh positif terhadap kemiskinan daerah tertinggal. Hal ini berarti makin meratanya pencapaian pendidikan, membaiknya sektor informal dengan perluasan ke sektor formal, dan perbaikan tingkat PDRB per kapita dapat menurunkan kemiskinan. Sementara itu, angka harapan hidup, ketimpangan pendapatan, dan angka beban ketergantungan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Dapat diartikan, dengan makin meningkatnya derajat kesehatan, makin tingginya ketidakmerataan pendapatan, dan makin tingginya angka beban ketergantungan akan menurunkan kemiskinan.

DPR RI bersama pemangku kepentingan terkait perlu memberikan perhatian serius terhadap isu ketimpangan sosial ekonomi di daerah tertinggal. Beberapa langkah strategis dapat dilakukan DPR RI bersama mitra kerja. *Pertama*, peningkatan relevansi pendidikan lokal. Komisi X DPR RI dapat mendorong pemerintah untuk mengembangkan kurikulum pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, seperti keterampilan di bidang pertanian, perikanan, dan kerajinan tangan. Tujuannya adalah meningkatkan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan pasar kerja lokal serta mengurangi angka pengangguran terselubung.

Kedua, penguatan layanan kesehatan masyarakat. Komisi IX DPR RI dapat mendorong pemerintah untuk melakukan pembangunan sektor kesehatan fokus pada pendekatan preventif dan promotif, bukan hanya kuratif. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan peran kader kesehatan desa, mengintegrasikan program kesehatan dengan kegiatan sekolah (misalnya imunisasi dan pemeriksaan kesehatan rutin), serta mengedukasi masyarakat tentang gaya hidup sehat.

Ketiga, pengembangan ekonomi lokal dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Komisi VII DPR RI dapat mendorong pemerintah mengembangkan ekonomi lokal berbasis potensi daerah melalui pemberdayaan masyarakat. Dukungan kepada UMKM dan koperasi, termasuk insentif peralihan ke sektor formal, pelatihan manajemen, dan akses pembiayaan, dapat menciptakan lapangan kerja berkelanjutan.

Keempat, evaluasi program perlindungan sosial. Komisi IX DPR RI dapat mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap program perlindungan sosial yang telah berjalan. Penyesuaian program perlindungan sosial diperlukan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat di daerah tertinggal. Program perlindungan sosial dapat diintegrasikan dengan bantuan tunai dan pangan dengan peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan anak sehingga program perlindungan sosial dapat memberikan dampak yang lebih luas.

Kelima, pemberdayaan perempuan dan sinergi antarlembaga. DPR RI, baik Komisi VIII, Komisi IX, maupun Komisi X, dapat mendorong pemerintah untuk melakukan

sinergi lintas sektor dengan fokus pada pemberdayaan perempuan. Program-program ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang melibatkan perempuan secara aktif terbukti dapat memperkuat ketahanan sosial-ekonomi keluarga miskin di daerah tertinggal.

Secara empiris, ketimpangan pendidikan, tingginya proporsi pekerja informal miskin, dan rendahnya PDRB per kapita terbukti memperburuk kondisi kemiskinan. Sementara itu, peningkatan derajat kesehatan, pengurangan ketimpangan pendapatan, dan penurunan angka beban ketergantungan dapat memberikan kontribusi positif terhadap penurunan kemiskinan. Melalui berbagai langkah strategis di atas, harapannya masyarakat di daerah tertinggal memperoleh manfaat dari pembangunan yang adil dan merata.

Daftar Pustaka

- Adiningtyas, A. P., & Budyanra, B. (2020). Determinants of districts/cities' education attainment inequality in East Java Province during 2014–2016. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(3), 1–18. <https://doi.org/10.14710/jdep.2.3.1-18>
- Alisjahbana, A. S., & Murniningtyas, E. (2018). *Tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia* (2nd ed.). Unpad Press.
- Amsal. (2018). *Kebijakan pemberdayaan sektor informal perkotaan*. Indocamp.
- Anggadini, F. (2015). Pendapatan domestik regional bruto per kapita terhadap kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2010–2013. *E-Jurnal Katalogis*, 3(7), 40–49. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/6373>
- Araujo, J. A., Marinho, E., & Campêlo, G. L. (2017). Economic growth and income concentration, and their effects on poverty in Brazil. *Cepal Review*, 123, 34–53. <https://doi.org/10.18356/F61073EF-EN>
- Asrol, A., & Ahmad, H. (2018). Analysis of factors that affect poverty in Indonesia. *Espacios*, 39(45), 14–25. <https://www.revistaespacios.com/a18v39n45/18394514.html>
- Augusta, I. (2014). *Ketimpangan wilayah dan kebijakan penanggulangan di Indonesia: Kajian isu strategis, historis, dan pragmatis sejak pra kolonial*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Badan Perencana Pembangunan Nasional [Bappenas]. (2014). *Buku I agenda pembangunan nasional: Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015–2019*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Badan Perencana Pembangunan Nasional [Bappenas]. (2018). *Analisis wilayah dengan kemiskinan tinggi*. Kedeputan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas.
- Badan Perencana Pembangunan Nasional [Bappenas]. (2020). *Rancangan teknokratik rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020–2024*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Badan Pusat Statistik [BPS]. (2021a). *Data dan informasi kemiskinan kabupaten/kota tahun 2021*. <https://www.bps.go.id/publication/2021/11/30/9e3602ea496ecc2f4751836f/data-dan-informasi-kemiskinan-kabupaten-kota-tahun-2021.html>
- Badan Pusat Statistik [BPS]. (2021b). *Penghitungan dan analisis kemiskinan makro Indonesia tahun 2021*. <https://www.bps.go.id/publication/2021/11/30/9c24f43365d1e41c8619dfe4/penghitungan-dan-analisis-kemiskinan-makro-indonesia-tahun-2021.html>
- Badan Pusat Statistik [BPS]. (2022a). *Produk domestik regional bruto kabupaten/kota di Indonesia 2017–2021*. <https://www.bps.go.id/publication/2022/06/07/59cf6a8a96b61d09c6d65260/produk-domestik-regional-bruto-kabupaten-kota-di-indonesia-2017-2021.html>
- Badan Pusat Statistik [BPS]. (2022b). *Tabel dinamis subjek indeks pembangunan manusia*. <https://bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab5>

- Badan Pusat Statistik [BPS]. (2022c). *Tabel dinamis subjek kemiskinan dan ketimpangan*. <https://bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab5>
- Chambers, R. (1995). Poverty and livelihoods: Whose reality counts? *Environmental and urbanization*, 7(1), 173–204. <https://doi.org/10.1177%2F095624789500700106>
- Dartanto, T., & Nurkholis. (2013). The determinants of poverty dynamics in Indonesia: Evidence from panel data. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 49(1), 61–84. <https://doi.org/10.1080/00074918.2013.772939>
- Febriaty, H. (2017). Pengaruh gini ratio, PDRB per kapita dan tingkat inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. *Quantitative Economics Journal*, 6(3), 173–187. <https://doi.org/10.24114/qej.v6i3.17544>
- Firdaus, A., Dawood, T. C., & Abrar, M. (2021). Determinants of poverty in Indonesia: An empirical evidence using panel data regression. *International Journal of Global Operations Research*, 2(4), 124–132. <https://doi.org/10.47194/ijgor.v2i4.90>
- Ginting, A. L. (2020). Dampak angka harapan hidup dan kesempatan kerja terhadap kemiskinan. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 7(1), 42–61. <https://doi.org/10.24252/ecc.v7i1.13197>
- Hatta, M., & Azis, A. (2017). Analisis faktor determinan tingkat kemiskinan di Indonesia periode 2005–2015. *Economics Bosowa Journal*, 3(8), 16–32. <http://economicsbosowa.unibos.id/index.php/eb/article/download/126/132>
- Irawan, P. B., Usman, H., Berliana, S. M., & Wicaksono, F. (2016). *Official statistics: Sosial-kependudukan*. In Media.
- Kumaat, R. J., Rotinsulu, D. C., & Rumat, V. A. (2019). Analysis of income inequality and Its effect on poverty through economic growth (case of Talaud Islands District). *Advances in Economics, Business and Management Research*, 132, 178–181. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200331.039>
- Lawanson, O. I., & Umar, D. I. (2021). The life expectancy–economic growth nexus in Nigeria: The role of poverty reduction. *SN Business & Economics*, 1(10), 1–26. <https://doi.org/10.1007/s43546-021-00119-9>
- Maipita, I. (2014). *Mengukur kemiskinan dan distribusi pendapatan*. UPP STIM YKPN.
- McKay, A. (2002). Defining and measuring inequality. *Briefing Paper*, 1, 1–6. <https://odi.org/en/publications/defining-and-measuring-inequality/>
- Marmujiono, S. P. (2014). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan dan strategi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Brebes tahun 2009–2011. *Economics Development Analysis Journal*, 3(1), 25–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/edaj.v3i1.3521>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020–2024. (2020).
- Rambe, J. (2018). *Kebijakan dan strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam mendukung penerapan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia*. Mitra Wacana Media.
- Randa, N. A., & Sentosa, S. U. (2020). Analisis kausalitas antara ketimpangan pendidikan, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24036/jkep.v2i1.8856>
- Riyadi, & Ghuzini, D. (2021). Ketimpangan pendidikan dan pendapatan serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16(2), 139–152. <https://doi.org/10.14203/jki.v16i2.593>
- Schneider, F., & Williams, C. C. (2013). *The shadow economy*. The Institute of Economic Affairs. <https://doi.org/10.4324/9780429460098-25>
- Setianingtiyas, R., Baiquni, M., & Kurniawan, A. (2019). *Pemodelan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia - modeling indicators of sustainable development goals in Indonesia*.

Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 27(2), 61-74. <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/JEP.27.2.2019.61-74>

- Spicker, P. (2002). *Poverty and the welfare state: Dispelling the myths* [Working paper]. Catalyst.
- Soetomo. (2006). *Strategi-strategi pembangunan masyarakat*. Pustaka Pelajar.
- Sudaryati, S., Ahmad, A. A., & Suprpto, S. (2021). The effect of average length of schooling, life expectancy, and economic growth on poverty in Banjarnegara Regency 2005-2019. *Eko-Regional: Jurnal Pengembangan Ekonomi Wilayah*, 16(1), 29-35. <https://doi.org/10.20884/1.erjpe.2021.16.1.1677>
- Thomas, V., Wang, Y. & Fan X. (2001). *Measuring education inequality: Gini coefficients of education* [Policy research working paper series 2525]. The World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/19738>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Pearson.
- Tungka, E. M., Engka, D. S. M., & Tumangkeng, S. Y. L. (2022). Analisis perbandingan tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(1), 1-12. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/38176>
- Wibowo, T. (2012). Kemiskinan, ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia (tinjauan analisis regional). *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 16(2), 24-54. <https://doi.org/https://doi.org/10.31685/kek.v16i2.41>